

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA
TAHUN 2015-2019)**

(Skripsi)

Oleh

RIFDAH QURRATUNNISA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2021**

ABSTRACT

COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS BETWEEN DISTRICT GOVERNMENT AND CITY GOVERNMENT (CASE STUDY IN REGENCY/CITY IN SUMATRA ISLAND 2015-2019)

By:

Rifdah Qurratunnisa

The difference in financial performance between district and city governments is one of the example of high economic gap. This is due to differences in the size of an area, population density levels and different regional income which can lead to fiscal imbalances between regions. This research aims to analyze the comparison of financial performance between district and city governments on Sumatra island during 2015 – 2019.

This study used financial statement data for all district and city governments on the island of Sumatra and analyzed the differences using descriptive statistic methods with quantitative data analysis technique using the Mann Whitney Test. The results of the study using the Mann Whitney Test showed that there were significant differences in the ratio of independency, efficiency, operating expenditure, capital expenditure, and the degree of fiscal decentralization, while the effectiveness ratio showed no significant difference between district and city governments.

Keywords : *Financial Performance, Financial ratio, Independence, Effectiveness, Efficiency, Operating Expenditure, Capital Expenditure, Degree Of Fiscal Decentralization*

ABSTRAK

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-2019)

Oleh :

RIFDAH QURRATUNNISA

Perbedaan kinerja keuangan antara pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota merupakan salah satu kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena perbedaan luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk serta hasil pendapatan daerah yang berbeda yang dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Penilaian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Sumatera selama tahun 2015 – 2019.

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pada seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Sumatera dan menganalisis perbedaan tersebut menggunakan metode statistik deskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif menggunakan Uji Mann Whitney. Hasil penelitian menggunakan Uji Mann Whitney menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio kemandirian, efisiensi, belanja operasi, belanja modal, dan derajat desentralisasi fiskal, sedangkan pada rasio efektivitas menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Belanja Operasi, Belanja Modal, Derajat Desentralisasi Fiskal

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA
TAHUN 2015-2019)**

Oleh:

Rifdah Qurratunnisa

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

**:PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN
PEMERINTAH KOTA (STUDI KASUS PADA
KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA
TAHUN 2015-2019)**

Nama Mahasiswa

: Rifdah Qurratunnisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 1711031062

Jurusan

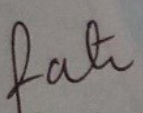
: Akuntansi

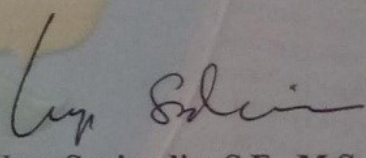
Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

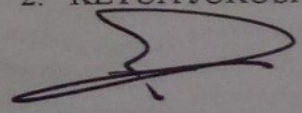
MENYETUJUI

1. KOMISI PEMBIMBING


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002


Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.
NIP. 19760830 200501 1003

2. KETUA JURUSAN


Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP. 19700817 199703 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.**

Penguji Utama : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1003

fatr
.....
Cup Ash
.....
Fitra *122
.....

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 November 2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rifdah Qurratunnisa

NPM : 1711031062

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 19 November 2021

Penulis



Rifdah Qurratunnisa

RIWAYAT HIDUP



Rifdah Qurratunnisa merupakan nama dari penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1999 di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Nuripin dan Ibu Fitrah Risnayanti. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2005-2011. Selanjutnya penulis mengenyam pendidikan menengah pertama di SMP Al Kautsar Bandar Lampung 2011-2014. Setelah tamat di pendidikan menengah pertama kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2014-2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama berkuliah peneliti merupakan anggota dari HIMAKTA (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulis skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Nuripin dan Ibunda Fitrah

Risnayanti terima kasih atas segala cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terbatas dan selalu mendoakan, menasihati, serta menjadi penyemangat dalam suka maupun duka sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberikan perlindungan baik di dunia dan akhirat, Aamiin.

Kakakku dan kedua adikku tersayang, Nabilah Putri Damayanti,

Muhammaf Faiz Habibi dan Muhammad Afif Baihaqqi terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik dan memberikan kebahagiaan dan kesuksesan.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku” (QS. Al-Baqarah:152)

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya..." (QS. At Thalaq :2-3)

“Berusahalah selalu untuk unggul dalam kebajikan dan kebenaran."

Nabi Muhammad SAW

"Instead of doubting yourself, love yourself more and the work you make for the world. Before you know, you'll be at the top of your world."

Park Jihyo

“La tahzan innallaha maana”

“Usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha maka akan sia-sia”

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang mempermudah proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktaviani, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing, memberikan saran dan kritik, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Usep Syaipuddin, S.E., M.S.Ak. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing, memberikan saran dan kritik, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu baik proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Nuripin dan Ibu Fitrah Risnayanti terima kasih atas segala cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terbatas serta selalu menjadi penyemangat dalam suka maupun duka. Semoga kelak penulis bisa membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti dan sholehah bagi Bapak dan Ibu.
11. Kakakku, Nabilah Putri Damayanti, terimakasih atas doa, cinta, dukungan dan motivasi serta selalu mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kelak penulis dapat membalas kebaikanmu.

12. Adikku Muhammad Faiz Habibi, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, bantuan serta selalu pengertian selama ini.
13. Adikku Muhammad Afif Baihaqqi, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, bantuan serta selalu pengertian selama ini.
14. Makwo Ani, Uncu Lina serta seluruh keluarga bapak. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan nasehat yang memperlancar perkuliahanku.
15. Bici Yuni, Manci Faza, Manci Iyan serta seluruh keluarga ibu. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan nasehat yang memperlancar perkuliahanku.
16. Sahabatku Vallen Natasha Quardo dan Shinta Ayu Rohana, terimakasih atas doa, semangat, dan banyaknya bantuan terkhusus pada akhir proses skripsi ini.
17. Sahabatku Nasha Acacia Almira, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat serta selalu ada dalam mendengarkan keluh kesah selama ini.
18. Sahabatku member kost umi (Noviyanti H Hutabarat dan Umi Haniah) terimakasih atas doa, dukungan, motivasi dan bantuannya selama ini.
19. Sahabatku member keluarga bahagia (Vallen, Shinta, Karin, Refiza, Umi, Novi, Nuriel, Samuel dan mendiang Febry), terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan serta kebersamaannya dari awal perkuliahan sampai pada akhir proses skripsi ini.
20. Temanku Sri Utami, terimakasih atas doa, dukungan serta bantuan selama proses skripsi.
21. Seluruh teman-teman Akuntansi Angkatan 2017 yang telah bersama dari awal perkuliahan dan saling mendukung satu sama lain hingga saat ini, semoga kalian sukses selalu.

22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT. Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesederhanaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Bandar Lampung, 19 November 2021

Penulis

Rifdah Qurratunnisa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Keagenan	8
2.2 Otonomi Daerah	9
2.3 Teori Desentralisasi Fiskal	10
2.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah	12
2.4.1 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.4.2 Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan Daerah	13
2.4.3 Analisis Rasio Keuangan Daerah	14
2.5 Penelitian Terdahulu.....	16
2.6 Hipotesis.....	18
2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota.....	18
2.6.2 Rasio Efektivitas Kabupaten dan Kota	18
2.6.3 Rasio Efisiensi Kabupaten dan Kota.....	19
2.6.4 Rasio Aktivitas Belanja Operasi Kabupaten dan Kota	20
2.6.5 Rasio Aktivitas Belanja Modal Kabupaten dan Kota	20

2.6.6 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten dan Kota.....	21
2.7 Kerangka Pemikiran	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data	24
3.2 Penentuan Sampel dan Populasi.....	24
3.3 Definisi Pengukuran Variabel	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data	29
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	29
3.5.2 Uji Normalitas.....	29
3.5.3 Uji Hipotesis	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Pulau Sumatera.....	31
4.2 Statistik Deskriptif.....	40
4.3 Uji Normalitas	42
4.4 Uji Hipotesis.....	44
4.5 Diskusi dan Analisis	45
4.5.1 Perbedaan Kemandirian Kabupaten dan Kota	45
4.5.2 Perbedaan Efektivitas Kabupaten dan Kota.....	48
4.5.3 Perbedaan Efisiensi Kabupaten dan Kota	50
4.5.4 Perbedaan Belanja Operasi Kabupaten dan Kota	53
4.5.5 Perbedaan Belanja Modal Kabupaten dan Kota	53
4.5.6 Perbedaan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten dan Kota	57
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Keterbatasan Penelitian	63
5.3 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019	4
Tabel 1.2 Rincian Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Kabupaten di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Rasio Kemandirian	25
Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Rasio Efektivitas	26
Tabel 3.3 Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi	27
Tabel 3.4 Kriteria Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	28
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	40
Tabel 4.2 Uji Normalitas	43
Tabel 4.3 Uji Hipotesis	44
Tabel 4.5.1 Hasil Uji Mann Whitney Rasio Kemandirian	47
Tabel 4.5.2 Hasil Uji Mann Whitney Rasio Efektivitas	49
Tabel 4.5.3 Hasil Uji Mann Whitney Rasio Efisiensi	52
Tabel 4.5.4 Hasil Uji Mann Whitney Rasio Belanja Operasi	54
Tabel 4.5.5 Hasil Uji Mann Whitney Rasio Belanja Modal	57
Tabel 4.5.6 Hasil Uji Mann Whitney Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	23

DAFTAR GRAFIK

Gambar	Halaman
Grafik 4.1 Rata-Rata Rasio Kemandirian	46
Grafik 4.2 Rata-Rata Rasio Efektivitas.....	48
Grafik 4.3 Rata-Rata Rasio Efisiensi	51
Grafik 4.4 Rata-Rata Rasio Belanja Operasi.....	53
Grafik 4.5 Rata-Rata Rasio Belanja Modal.....	55
Grafik 4.6 Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
LAMPIRAN 1 : Rasio Kemandirian.....	68
LAMPIRAN 2 : Rasio Efektivitas	72
LAMPIRAN 3 : Rasio Efisiensi.....	76
LAMPIRAN 4 : Rasio Belanja Operasi	78
LAMPIRAN 5 : Rasio Belanja Modal	82
LAMPIRAN 6 : Derajat Desentralisasi Fiskal.....	84
LAMPIRAN 7 : Statistik Deskriptif	89
LAMPIRAN 8 : Uji Normalitas	89
LAMPIRAN 9 : Uji Mann Whitney.....	92

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era awal reformasi pemerintah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah salah satunya yaitu UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Pada pelaksanaannya pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU No 22 Tahun 1999 menjadi UU No 32 Tahun 2004. Isi dari UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang, kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri seluruh pemerintahan dan pembangunan di daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah tidak mempunyai batasan untuk memajukan, memfasilitasi, dan membangun setiap daerah. Dalam mendukung peningkatan otonomi daerah maka pemerintah daerah melakukan pemungutan kepada masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting karena merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat besar dan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta dapat meningkatkan dan memantapkan otonomi daerah.

Wujud dari pelaksanaan otonomi yaitu salah satunya melalui aspek keuangan yang dapat disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan seluruh hasil pengelolaan keuangan daerah tertuang pada hasil dari APBD yang berisi semua penghasilan dari pendapatan serta belanja yang dilakukan selama periode tersebut (Saragih,2003). Adanya desentralisasi fiskal ini maka pemerintah masing masing daerah mempunyai wewenang dan kebijakan masing masing agar dapat mengelola keuangannya sendiri dan dapat menggali lebih dalam sumber-sumber penerimaan sesuai potensi daerah.

Seluruh hasil pengelolaan atas keuangan daerah tertuang pada Laporan APBD yang berisikan semua hasil dari pendapatan serta belanja yang dihasilkan selama periode tersebut. Pendapatan daerah diperoleh melalui retribusi, pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda, serta sumber uang lain yang sah digunakan untuk mendanai pengeluaran yang seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintahan pusat. Namun pada kenyataannya pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten, keduanya masih bergantung pada bantuan pendapatan dari pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan ini menandakan belum efektifnya pengelolaan keuangan dan minimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Untuk dapat mengetahui apakah suatu daerah sudah dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel maka dibutuhkan penilaian kinerja atas penghasilan keuangan daerah.

Penilaian atas kinerja keuangan pada pemerintah daerah ini berfungsi sebagai tolak ukur sejauh mana pendapatan daerah dapat menunjang pembiayaan pembangunan dan kegiatan daerah. Penilaian atas kinerja pemerintah daerah juga bertujuan agar masyarakat mengetahui apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban serta apakah pengalokasian pendapatan sudah dialokasikan dengan baik.

Timbulnya otonomi daerah serta desentralisasi fiskal ini memberikan keleluasaan pada setiap daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sehingga dapat terlihat perbedaan pembangunan dan peningkatan di setiap masing-masing daerah. Perbedaan kinerja keuangan masing-masing daerah antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi tinggi. Kondisi tersebut disebabkan adanya perbedaan luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk serta hasil pendapatan daerah yang berbeda yang dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Selain itu perbedaan tersebut juga bisa disebabkan oleh ketergantungan atas bantuan pendapatan yang didapatkan dari pusat ke daerah dimana hal itu dapat berdampak pada kemandirian yang ditunjukkan pada bagaimana pemerintah daerah mampu mendanai kegiatan untuk masyarakat

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gilang Sofyan Purnomo *et all* dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia) yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam kemandirian, derajat desentralisasi dan belanja operasi namun tidak ada perbedaan dalam kinerja efektivitas dan belanja modal. Hal sama dilakukan pada penelitian oleh Muhammad Zulkarnain *et all* yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemandirian keuangan daerah dan efektivitas daerah antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota di Provinsi Aceh.

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019.

Kota				
Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer
2015	1.057.113.704.170,26	1.084.684.058.049,42	200.084.598.622,57	856.558.737.360,32
2016	1.164.901.643.962,02	1.136.036.357.843,03	211.393.300.483,85	925.908.529.125,85
2017	1.168.044.715.885,68	1.130.099.004.945,50	264.070.215.102,09	895.331.179.773,16
2018	1.166.113.194.566,28	1.137.052.019.028,69	248.332.052.886,62	886.982.332.783,66
2019	1.291.209.806.773,20	1.238.875.039.123,70	268.534.262.608,60	975.003.180.238,50

Tabel 1.2 Rincian Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Kabupaten di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019.

Kabupaten				
Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer
2015	1.103.002.523.289,65	1.065.634.998.313,87	83.797.713.732,44	962.711.367.447,71
2016	1.250.258.617.782,05	1.118.002.004.835,32	89.865.343.315,62	1.114.840.262.618,59
2017	1.297.750.572.542,87	1.095.563.877.295,10	119.201.052.766,55	1.114.991.622.467,06
2018	1.303.499.361.579,31	1.086.660.095.535,94	108.259.414.029,81	1.120.518.853.358,65
2019	1.442.790.582.220,49	1.210.413.153.710,25	118.086.279.235,93	1.216.348.353.211,95

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah pusat masih mendominasi dari hasil total pendapatan daerah yaitu pendapatan transfer. Baik di kota maupun kabupaten pendapatan transfer masih menyumbang pendapatan terbesar yang berarti bahwa kemandirian daerah tersebut masih minimal sehingga perlu ditingkatkan kembali dalam memaksimalkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Pendapatan transfer pada pemerintah kabupaten jauh lebih besar dibandingkan pemerintah kota yang berarti pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah pada pemerintah kota jauh lebih maksimal dibandingkan kabupaten. Pendapatan transfer memang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintahan daerah namun jika pendapatan asli daerah namun jika dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan pendapatan asli daerah selalu mengalami penurunan maka pemerintah daerah tersebut belum

mampu dalam menggali serta mengolah sumber keuangan lokal daerah tersebut. Selain itu perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia tentu akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah yang akan menimbulkan kesenjangan pembangunan pada masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya, maka penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh mengenai rasio keuangan terhadap analisis kinerja keuangan daerah, dengan mengangkat judul **“Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra Tahun 2015-2019)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra Tahun 2015-2019?
2. Bagaimana perbandingan tingkat efektivitas keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra Tahun 2015-2019?
3. Bagaimana perbandingan tingkat efesiensi keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra Tahun 2015-2019?
4. Bagaimana perbandingan tingkat belanja operasi pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra Tahun 2015-2019?
5. Bagaimana perbandingan tingkat belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra Tahun 2015-2019?
6. Bagaimana perbandingan tingkat derajat desentralisasi fiskal keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra Tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbandingan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019
2. Mengetahui perbandingan tingkat efektivitas keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019
3. Mengetahui perbandingan tingkat efesiensi keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019
4. Mengetahui perbandingan tingkat belanja operasi pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019
5. Mengetahui perbandingan tingkat belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019
6. Mengetahui perbandingan tingkat derajat desentralisasi fiskal kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio keuangan daerah yang ada di Pulau Sumatera. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi yang berada di Pulau Sumatera tentang perbandingan kinerja keuangan antar kabupaten dan kota, dan penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengambil analisis perbandingan yang menampilkan perbedaan tiap daerah sehingga dapat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pertimbangan pengambilan keputusan tentang perencanaan serta pengalokasian anggaran di tahun berikutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara prinsipal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini juga dapat diaplikasikan terhadap sektor publik yaitu menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai hubungan keagenan. Dalam teori ini yang menggambarkan hubungan dengan masyarakat bahwa sebagai pemangku kepentingan utama masyarakat memiliki kewenangan untuk menilai dan mengukur kinerja pemerintah daerah dan pemerintah daerah sebagai agen yang menyediakan jasa untuk menyediakan kepentingan rakyat. Selain itu hubungan antar agen menurut Halim (2007) yaitu hubungan antar legislatif serta eksekutif yaitu sebagai prinsipal dan agen.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai agen harus bertanggung jawab penuh atas hasil kinerja kepada prinsipal. Pada pemerintah daerah hubungan dalam keagenan ini dilihat melalui penyusunan anggaran pendapatan. Pemerintah daerah sebagai agen harus menyerahkan hasil anggaran kepada pemerintah pusat dan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran. Jika pada agen manajer harus mempunyai moral untuk bertanggung jawab dalam

memaksimalkan keuntungan kepada pemilik maka di sektor publik pemerintah daerah sebagai agen harus memaksimalkan anggaran tersedia dengan menetapkan program dan pembangunan yang dapat memaksimalkan kepentingan masyarakat.

2.2 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Daerah otonom menurut Suparmako (2001) ialah keutuhan sekelompok rakyat dengan pemisah daerah yang memiliki wewenang menata dan melangsungkan hajat masyarakat berdasarkan arah atas gagasan sendiri masyarakat, Sementara itu otonomi daerah merupakan daerah yang memiliki kedaulatan dalam menata dan melangsungkan hajat atas satu gagasan berdasarkan kemauan rakyat.

Daerah yang melakukan otonom adalah suatu daerah dengan batas wilayah yang diberi kedaulatan dalam menyelenggarakan, mengusahakan kegiatan serta kebutuhan rakyat setempat atas gagasan berlandaskan tujuan dalam kiat NKRI. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah

dalam sistem NKRI. Menurut Mardiasmo (2002) pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.3 Teori Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-undang No 23 tahun 2014, “Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Salah satu bentuk penyerahan kewenangan dalam aspek keuangan yaitu dengan adanya desentralisasi fiskal. Menurut Prawirosetoto (Hastuti 2018), desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Dengan kata lain mengacu pada penyerahan kedaulatan secara fiskal dari pemerintah federal ke daerah otonom masing-masing, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan kebijakan di tiap tiap bidangnya. Proses desentralisasi fiskal dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD). Desentralisasi fiskal di Indonesia menurut Juanda *et all* (2013) sebagian besar

disebabkan oleh kebebasan dalam mengalokasikan belanja daerah, tetapi untuk menghindari ekonomi dengan biaya yang tinggi otoritas pendapatan daerah telah dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemerintah pusat telah memberikan kemampuan penuh kepada pemerintah daerah untuk menangani anggaran daerah mereka sendiri dan menghasilkan serta mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai hasil dari munculnya desentralisasi fiskal. Prinsip desentralisasi fiskal menurut Hastuti (2018) dalam hal ini ialah *money follow functions*, yaitu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerah. Salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan daerah yaitu dengan memberikan dana transfer dari pusat agar dapat dikelola dengan baik untuk menyelenggarakan kegiatan daerah. Otonomi daerah serta desentralisasi fiskal dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mampu mencapai desentralisasi fiskal demi memaksimalkan kapasitasnya dengan tersedianya sumber pendapatan. Menurut Mardiasmo pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat memberikan implikasi yang penting dalam kinerja perekonomian daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan desentralisasi fiskal yang telah diberikan dengan mengoptimalkan kemampuan dalam menggali potensi pendapatan.

Implikasi desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan baik apabila berpedoman pada hal-hal berikut (Halim, 2007) :

1. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*.
2. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
3. Stabilitas politik yang kondusif.
4. Proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, dimana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan memengaruhi keputusan-keputusan tersebut.
5. Desain kebijakan keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah.
6. Kualitas sumber daya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat.

2.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Bastian (2005) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 “kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik menurut Ulum (2009) adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja Keuangan Daerah dapat dinilai salah satunya dengan menggunakan pengukuran rasio keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Parameter keuangan menurut Mahmudi (2016) seperti derajat desentralisasi, kemandirian daerah, efektivitas PAD, belanja operasional, dan kesesuaian belanja modal dapat digunakan untuk menilai kinerja daerah.

2.4.1 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan mendasar dari pengukuran kinerja ini ialah untuk memberi motivasi kepada karyawan untuk menggapai tujuan organisasi dan mengikuti standar perilaku yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Menurut Mardiasmo (2002) tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.4.2 Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Ulum (2004) penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi organisasi, yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
2. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
4. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
5. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.4.3 Analisis Rasio Keuangan Daerah

2.4.3.1 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menentukan seberapa bergantung suatu daerah pada dukungan eksternal. Apabila semakin rendah rasio tersebut, maka semakin kecil tingkat potensi daerah tersebut pada ketergantungan pada dukungan eksternal. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang artinya semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

2.4.3.2 Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010) Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

2.4.3.3 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menurut Mahmudi (2010) ialah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam mengevaluasi seluruh pengeluaran dalam merealisasikan seluruh penerimaan yang diperolehnya untuk menentukan aktivitas pemungutan penerimaannya efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

2.4.3.4 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan kas untuk belanja operasi dan pembangunan dengan cara yang seoptimal mungkin. Menurut Halim (2007) jika bertambah tinggi jumlah uang yang diberikan untuk belanja rutin, semakin rendah dana yang dikeluarkan untuk investasi pembangunan dalam menciptakan sarana infrastruktur ekonomi bagi masyarakat.

2.4.3.5 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Gilang Sofyan Purnomo dan Komarudin Achmad, SE., M.Si., Ak.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia)	Temuan studi menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam kinerja pemerintah kota dan kabupaten ada di Indonesia pada aspek kemandirian, efesiensi, efektivitas, belanja modal, belanja operasi dan desentralisasi fiskal.
Yeni Mengkuningtyas dan Noval Adib, Ph.D., Ak., CA	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemekaran	Hasil analisis data berdasarkan aspek kemandirian, efisiensi, efektivitas, kesesuaian belanja modal, dan pertumbuhan PAD, penelitian ini menetapkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang substansial pada kinerja keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten sebelum dan sesudah pemekaran
Jatnika Dwi Asri	Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013	Selama periode 2009-2013, pada penelitian ini tidak ditemukan perbedaan pada variabel efektivitas antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berbeda dengan temuan pada rasio kemandirian yang mengungkapkan adanya kesenjangan antara pemerintah kabupaten dan kota

		di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 hingga 2013.
Sumitro	Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Timur	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aspek efektivitas, efesiensi, belanja rutin, pertumbuhan pendaoatan, dan pertumbuhan belanja pembangunan dalam hal ini tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Hasil pada aspek rasio pertumbuhan belanja rutin, kegiatan belanja pembangunan, dan kemandirian, di sisi lain mengungkapkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur terdapat perbedaan.
Putu Nenden Muliastini dan I Ketut Yadnyana	Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan Sarbagita Tahun Anggaran 2007-2011	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sarbagita tahun anggaran 2007-2011 berdasarkan kemandirian dan aktivitas, namun tidak terdapat perbedaan rasio efektivitas.
Muhammad Zulkarnain, Yulina Astuti, Krisniawati dan Mukarramah	Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	Berdasarkan kesimpulan penelitian pada kinerja keuangan, tidak ada perbedaan antara pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dalam kemandirian dan efektivitas.

2.6 Hipotesis

2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota

Rasio ini memperlihatkan bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pada daerah untuk mendanai kegiatan, membangun sarana umum, dan melayani masyarakat. Kemandirian keuangan daerah juga dapat ditunjukkan dari ketergantungannya pada dana dari sumber luar seperti pemerintah pusat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jatnika Dwi Sari menyatakan bahwa terdapat perbedaan terdapat perbedaan kinerja kemandirian keuangan daerah pada Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh terdapat perbedaan tingkat kemandirian tersebut dinilai karena adanya potensi penerimaan pajak pemerintah kota yang lebih besar dari pada potensi penerimaan pajak pemerintah kabupaten. Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat perbedaan kinerja kemandirian pada Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

2.6.2 Rasio Efektivitas Kabupaten dan Kota

Rasio efektivitas adalah ukuran keandalan daerah mencapai pendapatan daerah yang diantisipasi sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Menurut Mahmudi (2010) Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Sebelumnya

penelitian serupa pernah dilakukan oleh Sumitro (2020) dengan judul “Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Timur” menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah kota.

H2 : Terdapat perbedaan kinerja efektivitas pada Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

2.6.3 Rasio Efisiensi Kabupaten dan Kota

Menurut Mahmudi (2010) menghitung efektivitas pada PAD dinilai belum cukup karena meskipun efektivitas keuangan daerah tersebut baik tetapi biaya dalam mencapai target yang ditetapkan cukup besar sehingga pemungutan PAD dinilai belum efisien, oleh sebab itu dibutuhkan penilaian atas efisiensi kinerja keuangan. Rasio efisiensi adalah metode penilaian kinerja keuangan yang membandingkan pengeluaran pendapatan daerah dengan pendapatan yang direalisasikan dari daerah. Semakin efisien suatu rasio maka semakin kecil rasio tersebut, dan sebaliknya. Jumame (2016) mengemukakan bahwasanya ada perbedaan efisiensi kinerja keuangan pemerintah Kota Sorong dan pemerintah Kabupaten Sorong dikarenakan kinerja keuangan Kota Sorong diyakini lebih baik secara signifikan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.

H3 : Terdapat perbedaan kinerja efisiensi pada Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

2.6.4 Rasio Aktivitas Belanja Operasi Kabupaten dan Kota

Belanja rutin atau operasi yaitu suatu bentuk pengeluaran pemerintah daerah dalam membayar kebutuhan pemerintah daerah yang dalam jangka waktu yang pendek seperti membayar belanja pegawai, barang, subsidi dan lain-lain. Perbedaan aktivitas belanja rutin antara kabupaten dan kota biasanya terletak pada tingginya keperluan sehari-hari antara kabupaten dan kota. Seperti dalam penelitian yang diteliti oleh Gilang Sofyan Purnomo *et all*, yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara kota dan kabupaten yang berarti bahwa anggaran belanja daerah yang ditetapkan biaya operasional pemerintah kota lebih tinggi daripada pemerintah kabupaten yang disebabkan pada tingginya tunjangan kemahalan pada daerah kota.

H4 : Terdapat perbedaan kinerja aktivitas belanja operasi pada Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

2.6.5 Rasio Aktivitas Belanja Modal Kabupaten dan Kota

Belanja pembangunan merupakan salah satu bentuk belanja pemerintah yang sifatnya jangka panjang, non konsumtif, serta dapat menambah aset tetap yang dapat membuahkan hasil dari waktu ke waktu. Cara menghitung rasio aktivitas belanja pembangunan adalah dengan membandingkan total belanja pembangunan dengan total belanja daerah. Hasil penelitian Sumitro (2020) mengungkapkan adanya ketimpangan dalam kegiatan belanja pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah kota. Hal ini dikarenakan alokasi belanja pembangunan pemerintah kota dalam menyediakan infrastruktur ekonomi bagi masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi belanja pembangunan untuk menyediakan infrastruktur ekonomi bagi masyarakat.

H5 : Terdapat perbedaan kinerja aktivitas belanja modal pada Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

2.6.6 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten dan Kota

Derajat desentralisasi fiskal menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dalam memaksimalkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Menurut Mahmudi (2016) jika bertambah besar pemberian PAD maka bertambah besar kekuatan pemerintah untuk mewujudkan desentralisasi. Menurut studi oleh Gilang Sofyan Purnomo *et all* ada perbedaan pada desentralisasi fiskal antara pemerintah kabupaten dan kota, hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara kontribusi PAD pemerintah kota terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, yang lebih tinggi dari kontribusi pemerintah kabupaten terhadap PAD, dimana pajak dan retribusi daerah menguasai pendapatan PAD yang tinggi untuk daerah kota.

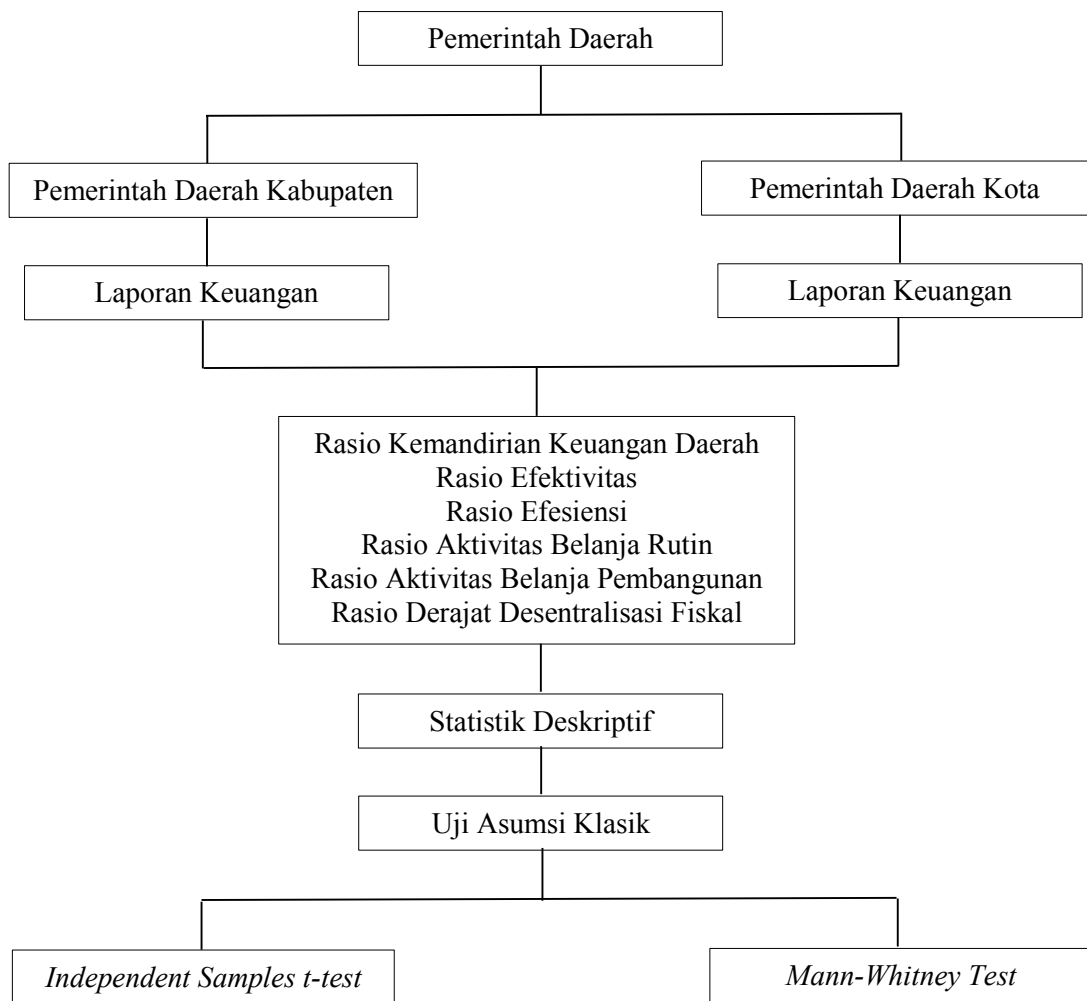
H6 : Terdapat perbedaan kinerja derajat desentralisasi fiskal pada Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

2.7 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah menjadi salah satu ladang pemerintah daerah dalam menggarap dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan keperluan masyarakat untuk memajukan baiknya pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu memberikan pemerataan secara efektif dan efisien, serta tumbuh dan berkembang tanpa mengandalkan bantuan pusat. APBD memuat semua hasil serta

kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan. APBD berfungsi sebagai dasar untuk membuat pilihan, menetapkan jumlah pendapatan dan belanja, dan mengembangkan kriteria standar untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

Peningkatan pendapatan dan belanja tentu mungkin akan mengubah hasil dalam APBD, sehingga memerlukan tinjauan kinerja pada keuangan. Mengkaji kinerja ini ialah satu dari pendekatan dalam mempelajari kemajuan daerah dalam membangun otonomi daerah. Penelitian yang menggunakan rasio keuangan dan kemampuan keuangan daerah berguna dalam mengungkapkan standar yang dibutuhkan dalam kinerja keuangan. Semakin tinggi rasio dan kemampuan keuangan yang dihasilkan, maka kinerja pada keuangan pemerintahan akan semakin baik.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2015-2019 dan seluruh data-data yang berkaitan dengan penelitian yang didokumentasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

3.2 Penentuan Sampel dan Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh komponen atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019. Sample dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019 yang berisi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

3.3 Definisi Pengukuran Variabel

Variabel dalam pengukuran kinerja keuangan yang menggunakan rasio keuangan ada 5 yaitu:

3.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah merupakan gambaran akan kemandirian daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal. Apabila ketergantungan dari bantuan luar semakin rendah maka akan daerah tersebut akan semakin tinggi dalam kemandirian. Rasio Kemandirian menurut Halim (2008) yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{bantuan pusat} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Dari pengukuran rasio kemandirian, maka didapat kriteria pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2014)

3.3.2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk menganalogikan kinerja realisasi dengan target yang ditetapkan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Jika rasio yang dihasilkan semakin besar maka besar kemungkinan daerah tersebut dalam

mengendalikan keuangan tersebut dapat menjadi semakin efektif. Menurut Halim (2007) formulasi rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Dari pengukuran rasio efektivitas, maka didapat kriteria pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

3.3.3 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menilai seberapa efisien suatu kegiatan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan pendapatan anggaran daerah. Dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 40% atau dapat dikatakan semakin kecil rasio maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dari pengukuran rasio efisiensi, maka didapat kriteria pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>40%	Tidak Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
10% - 20%	Efisien
<10%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2016)

3.3.4 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan gambaran pemerintah daerah membelanjakan pendapatannya untuk belanja operasional dan belanja modal demi semaksimal mungkin. Rasio aktivitas menurut Halim (2007) yaitu:

1) Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD

Secara umum, belanja operasional mencapai 60-90 persen dari belanja daerah secara keseluruhan. Daerah dengan kualitas pendapatan yang tinggi, menurut Mahmudi (2010) memiliki bagian biaya operasional yang besar dibandingkan dengan daerah dengan tingkat pendapatan yang kecil. Rasio Belanja Operasi dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja rutin/Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal terhadap APBD

Menurut Mahmudi (2010), persentase belanja modal yang diperhitungkan oleh belanja daerah berkisar antara 5% hingga 20%. Pengukuran pada rasio belanja modal dengan rumus berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.3.5 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal ditentukan dengan membandingkan PAD dengan pendapatan keseluruhan. Selain itu hal ini menunjukkan seberapa besar andil PAD pada keseluruhan pendapatan. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Dari pengukuran rasio derajat desentralisasi fiskal, maka didapat kriteria pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Kriteria Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap TPD (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tangkilisan,(2005:83)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan data sekunder yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi adalah cara memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, makalah, angka

tertulis, dan foto dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penelitian (Sugiyono, 2015). Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa Profil Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2015–2019 serta data lainnya yang diperlukan terkait dengan metode analisis yang digunakan.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata rata (mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan sum). Teknik statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis data pertama dalam penelitian ini. Statistik deskriptif adalah suatu metode penelitian untuk menggambarkan variabel penelitian.

3.5.2 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas yang membandingkan dua kelompok data untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogrov-Smirnov. Jika data yang dievaluasi terdistribusi secara teratur atau signifikansinya lebih dari 0,05 persen maka uji statistik parametrik yang digunakan dalam pengujian hipotesis yaitu uji t dua sampel independen,. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal atau signifikasinya kurang dari

0,05%, maka digunakan uji statistik non parametrik yang disebut uji Mann Whitney untuk pengujian hipotesis.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 *Independent Sample t Test*

Independent Samples t Test atau Uji t dua sampel bebas merupakan uji statistika parametrik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan dengan asumsi data terdistribusi normal. Apabila hasil uji signifikansi menunjukkan sebesar $\alpha=5\%$, maka terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Sedangkan jika hasil uji probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan.

3.5.3.2 *Mann Whitney Test*

Uji *Mann Whitney* adalah uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan sebagai pengganti uji-t dua sampel independen untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berhubungan dengan asumsi bahwa data tidak terdistribusi normal. Terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan jika hasil uji signifikansi menunjukkan 0,05. Sedangkan jika hasil uji probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka rata-rata kedua kelompok sampel yang tidak berhubungan adalah sama atau tidak terdapat perbedaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera. Variabel dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan derajat desentralisasi fiskal. Sampel yang digunakan di penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji hipotesis, terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja kemandirian keuangan daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi PAD dan rendahnya ketergantungan pendapatan transfer pada pemerintah kota dibandingkan pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, H1 diterima.
2. Berdasarkan uji hipotesis, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja efektivitas keuangan daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten dapat membuat realisasi PAD jauh lebih besar daripada yang dianggarkan sehingga dapat memberikan efektivitas pada keuangan daerah. Dengan kata lain, H2 tidak terdukung

3. Berdasarkan uji hipotesis, terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja efisiensi keuangan daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah kota lebih besar dibandingkan penerimaannya sehingga dianggap kurang efisien, namun berbeda dengan pemerintah kabupaten dimana pengeluaran tidak lebih besar daripada realisasi PAD sehingga pemerintah kabupaten dianggap efisien dalam mengelola keuangan daerah. Dengan kata lain, H3 diterima.

4. Berdasarkan uji hipotesis, terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja belanja operasi keuangan daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan alokasi belanja operasi pemerintah kota jauh lebih besar daripada pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, H4 diterima.

5. Berdasarkan uji hipotesis, terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja belanja modal keuangan daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan proporsi alokasi belanja modal pemerintah kabupaten untuk dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kota. Dengan kata lain, H5 diterima.

6. Berdasarkan uji hipotesis, terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan pemerintah kota lebih tinggi memberikan kontribusi PAD terhadap pendapatan dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, H6 diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini mempunyai keterbatasan waktu dimana kurang memperbarui tahun penelitian, karena adanya keterbatasan dalam memperoleh data penelitian.
2. Penelitian ini terbatas pada lima variabel yaitu kemandirian, efektivitas, efesiensi, aktivitas dan derajat desentralisasi fiskal.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah daerah yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di rentang waktu yang berbeda dan juga dapat memperluas sampel penelitian sehingga hasil penelitian akan jauh lebih luas dan beragam.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat pengukuran analisis penilaian kinerja keuangan lainnya seperti analisis pertumbuhan, kemampuan keuangan daerah, analisis varians, analisis regresi dan analisis keuangan lainnya.
3. Bagi pemerintah daerah kota dan kabupaten diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan pemungutan PAD dengan baik sehingga kontribusi PAD jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan transfer sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah.

4. Bagi pemerintah daerah dapat memperbesar alokasi belanja modal untuk penyediaan sarana pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga.
- Dwi Asri, J. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1021–1034.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Ketiga). Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). *Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia*. 784–799.
- Jensen, Michael C; Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jumame, F. (2016). Analisis Pebandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Dan Pemerintah Kota Sorong Periode 2012-2016 Farley. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 6, 63–80.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Kedu). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ketu). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (BPFE-Yogyakarta (ed.); Pertama).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mengkuningtyas, Y. (2015). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemekaran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purnomo G.S., K. A. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia). *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699.

Prawirosetoto. (2002). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.

Salamun, S. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Saragih, J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonom*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumitro. (2020). PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA DI JAWA TIMUR. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(11), 1651–1663.

Taufik. (2017). *ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA SE-SUMATERA*. 7(1), 993–1012.

Tuti Meutia. (2021). *PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR*. 5(1), 31–44.

Undang-undang No. 22 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yadnyana, I. K. (2013). *PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KAWASAN METROPOLITAN SARBAGITA TAHUN ANGGARAN 2007-2011 Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. 1*, 92–108.

Zulkarnain M., Astuti Y., Krisniawati., M. (2016). *Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi. 4*(2), 1021–103